

LAPORAN
TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

BAB I Pendahuluan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah mendorong percepatan akses keuangan di Kabupaten Banggai Kepulauan melalui optimalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Hal itu disampaikan Wakil Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah Andri Arsasi saat audiensi dengan Bupati Banggai Kepulauan, Ihsan Basir di Kantor Bupati Banggai Kepulauan, Kamis 8 September 2022. Hadir dalam pertemuan, tim dan anggota TPAKD Banggai Kepulauan yang terdiri dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perwakilan Perbankan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Dalam pertemuan tersebut, selain menyampaikan tujuan dan maksud pembentukan TPAKD Kabupaten Banggai Kepulauan rencana program kerja dan program tematik TPAKD nasional yang dapat diselaraskan dengan program kerja Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. TPAKD merupakan forum koordinasi antar pemangku kepentingan dan juga pelaku usaha jasa keuangan di daerah percepatan akses keuangan tentu akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan harapan mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Keberadaan TPAKD Kabupaten Banggai Kepulauan saat ini menjadi sangat penting sebagai katalis ekosistem perekonomian daerah, dengan peningkatan akses keuangan khususnya melalui beberapa program kerja yang menjadi prioritas bagi Pemerintah Daerah kabupaten Banggai Kepulauan yakni :

1. Pengembangan Potensi Ekonomi Unggulan Daerah
2. Pelatihan dan pengembangan UMKM Unggulan
3. Peningkatan Pemanfaatan Produk dan Layanan Industri Keuangan Non Bank
4. Maida Batabung
5. Kegiatan Edukasi Keuangan
6. Fasilitasi KUR
7. Fasilitasi Ekosistem Keuangan Inklusif Wilayah Perdesaan Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara
8. Percepatan dan Perluasan Akses Keuangan Masyarakat Melalui Agen Laku Pandai

Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 100.3.3.2/211/ Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Banggai



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/211 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses layanan keuangan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya partisipasi dari semua pemangku kepentingan dan peran dari Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat, perlu dibentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai forum koordinasi bagi lembaga Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mengakses keuangan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 554);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

- Memperhatikan :
1. Radiogram Menteri Dalam Negeri No. T-900/634/ Keuda, tanggal 19 Februari 2016 tentang Pembentukan TPAKD dan Amanat Menteri Dalam Negeri pada Rakornas TPAKD 2020 untuk segera membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD);
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/7105/SJ tanggal 15 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Pengarah :
 1. mengambil keputusan atas hal – hal yang bersifat strategis dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas Tim percepatan Akses Keuangan Daerah; dan
 2. melakukan koordinasi yang bersifat strategis dengan pimpinan kantor perwakilan Kementerian/Lembaga Negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah.
 - b. Koordinator :
 1. mengambil keputusan dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
 2. menyampaikan rekomendasi kepada pengarah dalam rangka Percepatan Akses Keuangan Daerah;
 3. melakukan koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan Kementerian/Lembaga Negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses Keuangan daerah berdasarkan arahan dari pengarah atau menindaklanjuti hasil rapat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah; dan
 4. memimpin pertemuan koordinasi.
 - c. Wakil Koordinator :
 1. membantu koordinator dalam mengambil keputusan dan memberikan arahan teknis serta masukan terkait pelaksanaan tugas TPAKD;
 2. membantu koordinator dalam menyampaikan rekomendasi kepada Pembina melalui Pengarah dalam rangka percepatan akses keuangan di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 3. membantu koordinator dalam melakukan koordinasi dengan pimpinan Kantor Perwakilan, Kementerian/Lembaga Negara lainnya di Kabupaten Banggai Kepulauan dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan di Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan arahan dari Pengarah atau menindaklanjuti hasil rapat Tim; dan
 4. mewakili, melaksanakan tugas koordinator apabila berhalangan.
 - d. Sekretaris :
 1. menjadi fasilitator dan inisiator terhadap pelaksanaan tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
 2. bersama dengan koordinator mengambil keputusan dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
 3. bersama dengan koordinator menyampaikan rekomendasi kepada pengarah dalam rangka percepatan akses Keuangan Daerah;

4. bersama dengan koordinator melakukan koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan Kementerian/Lembaga Negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses Keuangan daerah berdasarkan arahan dari pengarah atau menindaklanjuti hasil rapat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
 5. menatausahakan kegiatan dan dokumen Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
 6. melakukan korespondensi yang terkait dengan kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
 7. memimpin pertemuan koordinasi jika koordinator berhalangan hadir; dan
 8. melakukan tugas kesekretariatan lainnya.
- e. Anggota :
1. menghadiri pertemuan koordinasi;
 2. memberikan masukan dan rekomendasi pada pertemuan koordinasi dalam rangka penyusunan/evaluasi program kerja dan kebijakan percepatan akses Keuangan Daerah; dan
 3. melaksanakan program akses Keuangan yang ditetapkan sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.

- KETIGA** : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dibantu oleh Kelompok Kerja Teknis dan Sekretariat TPAKD yang berkedudukan di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dapat meminta bahan/data yang diperlukan kepada unit kerja/pihak yang terkait.
- KELIMA** : Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEENAM** : Masa Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 18 Maret 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDUDY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
7. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/211 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Banggai Kepulauan/	Pengarah 1
2.	Wakil Bupati Banggai Kepulauan	Pengarah 2
3.	Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah	Pengarah 3
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Koordinator
5.	Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan	Wakil Koordinator 1
6.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan	Wakil Koordinator 2
7.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan	Sekretaris 1
8.	Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah	Sekretaris 2
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
10.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
11.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
12.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota

13.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
14.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
15.	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
16.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
17.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
18.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
19.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
20.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
21.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
22.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
23.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
24.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
25.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
26.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
27.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
28.	Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
29.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Bagian Perekonomian Setda	Anggota

30.	Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Unit Salakan di Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
31.	Pimpinan Cabang PT BPD Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
32.	Pimpinan Kantor Cabang Pembantu PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 211 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
KELOMPOK KERJA TEKNIS

I SUSUNAN KEANGGOTAAN

A. Koordinator : Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
Kabupaten Banggai Kepulauan

Ketua Tim : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten
Banggai Kepulauan

B. Kelompok Kerja Data dan Informasi

Ketua : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
UKM Kabupaten Banggai Kepulauan

Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Banggai Kepulauan
2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai
Kepulauan
4. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Banggai Kepulauan
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Banggai Kepulauan
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai
Kepulauan
8. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai
Kepulauan

C. Kelompok Kerja Kajian dan Kebijakan :

Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan

Anggota : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan

D. Kelompok Kerja Optimalisasi Akses Keuangan :

Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan

Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Unit Salakan di
Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Pimpinan Cabang PT BPD Sulawesi Tengah Kabupaten
Banggai Kepulauan
4. Pimpinan Kantor Cabang Pembantu PT.Bank Mandiri
(Persero) Tbk Kabupaten Banggai Kepulauan

E. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi :

- Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- Anggota : 1. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Unsur Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan

F. Sekretariat : Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan

II. URAIAN TUGAS

A. Kelompok Kerja Data dan Informasi mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan data dan informasi, antara lain meliputi :
 - a. Sektor usaha produktif di Kabupaten Banggai Kepulauan dan portofolio pembiayaan oleh Lembaga Jasa Keuangan, meliputi daerah, sektor, jenis usaha;
 - b. Sektor usaha unggulan di Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
 - c. Jumlah usaha mikro kecil menengah yang dibiayai Lembaga Jasa Keuangan;
 - d. Kecamatan/kelurahan dengan pertumbuhan ekonomi yang masih rendah;
 - e. Kecamatan/kelurahan dengan akses keuangan yang masih rendah; dan
 - f. Data-data lainnya sesuai kebutuhan.
2. Menatausahakan hasil atau kemajuan kegiatan Tim sebelum dan sesudah pelaksanaan program Tim bersumber dari Kelompok Kerja dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah lainnya;
3. Menyediakan data dan informasi terkini hasil pelaksanaan program Tim untuk pihak lain yang membutuhkan;
4. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan;
5. Menyelenggarakan pertemuan bulanan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja sesuai bidangnya; dan
6. Membuat laporan kemajuan kegiatan kepada sekretariat setiap bulan.

B. Kelompok Kerja Kajian dan Kebijakan mempunyai tugas :

1. Mengkaji data dan informasi yang diperoleh dari Kelompok Kerja Data dan Informasi untuk mengetahui permasalahan akses keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Mengidentifikasi potensi ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan yang belum memperoleh dan/atau untuk lebih mengembangkan akses keuangan daerah terkait produk dan layanan jasa keuangan;
3. Membuat rekomendasi kebijakan untuk membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat (UMKM, startup business, sector prioritas, dan lain-lain);
4. Menyelenggarakan pertemuan bulanan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja sesuai bidangnya; dan
5. Membuat laporan kemajuan kegiatan kepada sekretariat setiap bulan.

C. Kelompok Kerja Optimalisasi Akses Keuangan mempunyai tugas :

1. Membuka dan/ atau memperluas akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat/sektor usaha di Kabupaten Banggai Kepulauan Sesuai rekomendasi dari Kelompok Kerja Kajian dan Kebijakan;
2. Menyelenggarakan edukasi untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Sesuai rekomendasi dari Kelompok Kerja Kajian dan Kebijakan;
3. Melakukan asistensi kepada sektor usaha mikro kecil menengah, startup business, dan sektor prioritas;
4. Mendorong optimalisasi potensi sumber dana di Kabupaten Banggai Kepulauan dalam memperluas penyediaan pendanaan sektor produktif;
5. Melakukan koordinasi dan kemitraan dengan instansi terkait untuk percepatan akses keuangan;
6. Menyelenggarakan pertemuan bulanan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja sesuai bidangnya; dan
7. Membuat laporan kemajuan kegiatan kepada sekretariat setiap bulan.

D. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja Tim termasuk realisasi anggaran;
2. Melakukan survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan program kerja Tim dan kendala-kendala yang dihadapi;
3. Melakukan koordinasi dengan pokja lainnya terkait pelaksanaan program kerja Tim;
4. Menyelenggarakan pertemuan bulanan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Kelompok Kerja sesuai bidangnya; dan
5. Menyusun laporan hasil monitoring/kemajuan dan evaluasi secara bulanan, triwulanan, dan semesteran untuk disampaikan kepada Sekretariat.

E. Sekretariat mempunyai Tugas :

1. Menerima dan menyusun Program Kerja yang disampaikan oleh masing-masing kelompok Kerja selanjutnya dilaporkan ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah dan diinput melalui Aplikasi Sit-TPAKD.
2. Mengumpulkan Data Kegiatan yang berkaitan dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah yang dilaksanakan oleh semua kelompok kerja TPAKD; dan
3. Menyusun, menginput dan menyampaikan laporan kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah setiap Triwulan dan menyusun laporan tahunan untuk dilaporkan pada Kantor Otoritas jasa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dan Kantor Otoritas jasa Keuangan Pusat.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



BANGGAI KEPULAUAN

BAB II

PROGRAM KERJA TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

1.1 Pengembangan Potensi Ekonomi Unggulan Daerah

Pengembangan Potensi Ekonomi Unggulan Daerah adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan ekonomi daerah agar menjadi sumber pendapatan dan penghidupan Masyarakat setempat.

Untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah, dapat melakukan langkah-langkah berikut: Mengidentifikasi semua potensi yang dimiliki daerah, Menentukan keunggulan dari setiap potensi yang dimiliki, Melihat keterkaitan antara potensi daerah dengan daerah lain di sekitarnya, Menyusun skala prioritas, Meningkatkan kualitas dan produksi.

Pengembangan potensi ekonomi daerah dapat dilakukan dengan: Mengelola sumber daya yang ada, Membentuk kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta, Meningkatkan investasi, Menciptakan lapangan kerja.

1.1.1 Rapat Pleno Semester 1 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Se-Sulawesi Tengah Tahun 2025 dan Rapat Koordinasi TPAKD Program Kerja Triwulan I TPAKD Kabupaten banggai Kepulauan, Edukasi Keuangan Kepada Camat, Lurah dan Kepala Desa“Banggai Kepulauan Cerdas Finansial”

Dalam rangka evaluasi program kerja tahun 2024 dan penyusunan rencana

program kerja tahun 2025 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) SeSulawesi Tengah, kami mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti Rapat Pleno TPAKD Se-Sulawesi Tengah yang rencananya akan diselenggarakan pada hari Selasa 25 Maret 2025

Kegiatan tersebut diselenggarakan di Ruang Rapat Umum Kantor Bupati Banggai Kepulauan. Turut hadir Wakil Bupati Banggai Kepulauan, Pj. Sekda Kab. Banggai Kepulauan, Kepala-Kepala Bank, Kepala Kantor

kementrian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan,Kepala OPD yang
Terkait dan kepala OJK dan Staf

Mengingat pentingnya agenda kegiatan ini sudah menetapkan dan
melaporkan rencana program kerja tahun 2025 secara tepat waktu,
mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memastikan sekretariat TPAKD
Bapak/Ibu masing-masing yang memiliki hak akses di aplikasi TPAKD
beserta anggota TPAKD Bapak/Ibu dapat hadir tepat waktu dan
menyampaikan usulan program kerja sesuai dengan *roadmap* TPAKD
tahun 2025, Mcndasari Surat Kcpala Otoritas Jasa Kcuangan
(OJK) Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor: S-275/KO.1601/2025
tentang Permohonan Audiensi dan dukungan kegiatan pelaksanaan rapat
koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
Kabupaten Banggai Kepulauan.

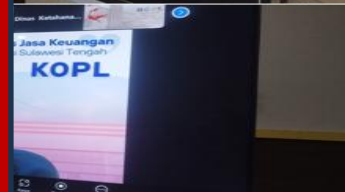
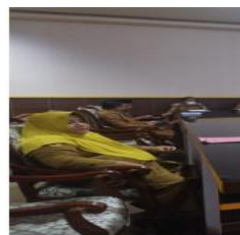
Dokumentasi Kegiatan FGD

Informasih

Evidence

1. Sebagai undangan Peserta Rapat

- Waktu Penyelenggaraan *Rapat Virtual Zoom Kegiatan Pleno Semester 1 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Se-Sulawesi Tengah Tahun 2025*
- Peserta Undangan : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan , Kepala OPD terkait dan OJK.



2. Sebagai undangan Peserta Rapat

- Waktu Penyelenggaraan *Rapat Koordinasi TPAKD Program Kerja Triwulan 1 TPAKD Kabupaten Banggai Kepulauan.*
- Peserta Undangan : Wakil Buapto Banggai Kepulauan, Kepala OPD terkait, OJK dan Bagian Perekonomian.
- Waktu Penyelenggaraan *Rapat Edukasi Kepada Camat Se-Kabupaten , Lurah Se-Kabupaten dan Kepala Desa Se-Kabupaten*
- Peserta Undanga Rapat : Wakil Bupati Banggai Kepulauan, Pj. Sekda Banggai Kepulauan, Kepala OPD Terkait, Kepala OJK dan Staf, Camat Se-kabupaten, Lurah Se-kabupaten dan Kepala Desa Se-kabupaten.



Nomor : S-153/KO.1601/2025



Nomor : S-153/KO.1601/2025 24 Maret 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Undangan Rapat Pleno Semester 1 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Se-Sulawesi Tengah Tahun 2025

- Yth. 1. Koordinator TPAKD Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
2. Sekretariat TPAKD Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

TPAKD Provinsi Sulawesi Tengah
di tempat

Dalam rangka evaluasi program kerja tahun 2024 dan penyusunan rencana program kerja tahun 2025 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Se-Sulawesi Tengah, kami mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti Rapat Pleno TPAKD Se-Sulawesi Tengah yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 25 Maret 2025
Waktu : 09.00 s.d 11.00 WITA
Tempat : Virtual Meeting melalui zoom meeting
ID Rapat : <https://bit.ly/PLENOTPAKD>
916 7092 7843
Password : 926723
Agenda : terlampir

Mengingat pentingnya agenda kegiatan ini udah menetapkan dan melaporkan rencana program kerja tahun 2025 secara tepat waktu, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memastikan sekretariat TPAKD Bapak/Ibu masing-masing yang memiliki hak akses di aplikasi SiTPAKD beserta anggota TPAKD Bapak/Ibu dapat hadir tepat waktu dan menyampaikan usulan program kerja sesuai dengan *roadmap* TPAKD tahun 2025.

Selanjutnya untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi pegawai kami yaitu Sdri. Megawati dengan nomor telp. 085241444783 atau surel di alamat megawati.megawati@ojk.go.id.

Demikian kami sampaikan. Atas kehadirannya tepat pada waktunya, kami ucapkan terima kasih.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Nomor : 500.3.4.1/1901/Bag.Ekon/VI/2025



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kompleks Bukit Trikora No. Telp. (0462) Fax

Salakan

Kode Pos 94785

Salakan, 23 Juni 2025

Nomor : 500.3.4.1/1901/Bag. Ekon/VI /2025
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Undangan

Yth. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Banggai
Kepulauan
di -
Tempat.

Dengan hormat,

Mendasari Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor : S-275/KO.1601/2025 tentang Permohonan Audiensi dan dukungan kegiatan pelaksanaan rapat koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Banggai Kepulauan, untuk itu dimohon kehadiran Bapak / Ibu pada kegiatan dimaksud yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa 24 Juni 2025

Pukul : 09.00 wita s/d Selesai

Tempat : Ruang Rapat Kantor Bupati Banggai Kepulauan

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


P/SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
SURIPTO NURDIN, S.Sos
Perintah / Iama Muda, IV/c
NIP. 19670507 200212 1 005

Daftar lampiran undangan :

Kepada Yth :

- 1) Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan
- 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- 3) Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan
- 4) Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Banggai Kepulauan
- 5) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- 6) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- 7) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan
- 8) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan
- 9) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan
- 10) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan
- 11) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan
- 12) Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan
- 13) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan
- 14) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan
- 15) Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan
- 16) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai Kepulauan
- 17) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan
- 18) Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan
- 19) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan
- 20) Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan
- 21) Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banggai Kepulauan


P/SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
SURIPTO NURDIN, S.Sos
Perintah / Iama Muda, IV/c
NIP. 19670507 200212 1 005

Tembusan Kepada Yth:

- Bupati Banggai Kepulauan sebagai laporan
- Arsip

Nomor : 500.3.4.1/1906/Bag.Ekon/VI/2025



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Kompleks Bukit Trikora No. Telp. (0462) Fax

Salakan

Kode Pos 94785

Salakan, 23 Juni 2025

Nomor : 500.3.4.1/1906/Bag. Ekon/VI /2025
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Yth. Pimpinan Cabang PT. BPD Sulawesi Tengah
di -

Tempat.

Dengan hormat,

Mendasari Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor : S-275/KO.1601/2025 tentang Permohonan Audiensi dan dukungan kegiatan pelaksanaan rapat koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Banggai Kepulauan, untuk itu dimohon kehadiran Bapak / Ibu pada kegiatan dimaksud yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa 24 Juni 2025

Pukul : 09.00 wita s/d Selesai

Tempat : Ruang Rapat Kantor Bupati Banggai Kepulauan

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


SURIPTO NURDIN, S.Sos
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670507 200212 1 005

Tembusan Kepada Yth:
- Bupati Banggai Kepulauan sebagai laporan
- Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Kompleks Bukit Trikora No. Telp. (0462) Fax

Salakan

Kode Pos 94785

Salakan, 23 Juni 2025

Nomor : 500.3.4.1/1905/Bag. Ekon/VI /2025
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Yth. PT. BPRS Khairan Inti Amanah

di -

Tempat.

Dengan hormat,

Mendasari Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor : S-275/KO.1601/2025 tentang Permohonan Audiensi dan dukungan kegiatan pelaksanaan rapat koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Banggai Kepulauan, untuk itu dimohon kehadiran Bapak / Ibu pada kegiatan dimaksud yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa 24 Juni 2025

Pukul : 09.00 wita s/d Selesai

Tempat : Ruang Rapat Kantor Bupati Banggai Kepulauan

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


SURIPTO NURDIN, S.Sos
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670507 200212 1 005

Tembusan Kepada Yth:
- Bupati Banggai Kepulauan sebagai laporan
- Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Kompleks Bukit Trikora No. Telp. (0462) Fax

Salakan

Kode Pos 94785

Salakan, 23 Juni 2025

Nomor : 500.3.4.1/1906/Bag. Ekon/VI /2025
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Yth. Pimpinan BPR Modern Express kc Salakan

di -

Tempat.

Dengan hormat,

Mendasari Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor : S-275/KO.1601/2025 tentang Permohonan Audiensi dan dukungan kegiatan pelaksanaan rapat koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Banggai Kepulauan, untuk itu dimohon kehadiran Bapak / Ibu pada kegiatan dimaksud yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa 24 Juni 2025

Pukul : 09.00 wita s/d Selesai

Tempat : Ruang Rapat Kantor Bupati Banggai Kepulauan

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


SURIPTO NURDIN, S.Sos
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670507 200212 1 005

Tembusan Kepada Yth:
- Bupati Banggai Kepulauan sebagai laporan
- Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Kompleks Bukit Trikora No. Telp. (0462) Fax

Salakan

Kode Pos 94785

Salakan, 23 Juni 2025

Nomor : 500.3.4.1/1906/Bag. Ekon/VI /2025
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Yth. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Unit Salakan

di -

Tempat.

Dengan hormat,

Mendasari Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor : S-275/KO.1601/2025 tentang Permohonan Audiensi dan dukungan kegiatan pelaksanaan rapat koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Banggai Kepulauan, untuk itu dimohon kehadiran Bapak / Ibu pada kegiatan dimaksud yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa 24 Juni 2025

Pukul : 09.00 wita s/d Selesai

Tempat : Ruang Rapat Kantor Bupati Banggai Kepulauan

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


SURIPTO NURDIN, S.Sos
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670507 200212 1 005

Tembusan Kepada Yth:
- Bupati Banggai Kepulauan sebagai laporan
- Arsip

Nomor : 500.3.4.1/1907/Bag.Ekon/VI/2025



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Kompleks Bukit Trikora No. Telp. (0462) Fax

Salakan

Kode Pos 94785

Salakan, 23 Juni 2025

Nomor : 500.3.4.1/1907/Bag. Ekon/VI /2025
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan

di -
Tempat.

Dengan hormat,

Mendasari Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor : S-275/KO.1601/2025 tentang Permohonan Audiensi dan dukungan kegiatan pelaksanaan rapat koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Banggai Kepulauan, untuk itu dimohon kehadiran Bapak / Ibu pada kegiatan dimaksud yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa 24 Juni 2025

Pukul : 09.00 wita s/d Selesai

Tempat : Ruang Rapat Kantor Bupati Banggai Kepulauan

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


SURIPTO NURDIN, S.Sos
Pemimpin Utama Muda, IV/c
NIP. 19670507 200212 1 005

Tembusan Kepada Yth:
- Bupati Banggai Kepulauan sebagai laporan
- Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Kompleks Bukit Trikora No. Telp. (0462) Fax

Salakan

Kode Pos 94785

Salakan, 23 Juni 2025

Nomor : 500.3.4.1/1907/Bag. Ekon/VI /2025
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Yth. Pimpinan Kantor Cabang Pembantu PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk Kabupaten Banggai Kepulauan

di -
Tempat.

Dengan hormat,

Mendasari Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor : S-275/KO.1601/2025 tentang Permohonan Audiensi dan dukungan kegiatan pelaksanaan rapat koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Banggai Kepulauan, untuk itu dimohon kehadiran Bapak / Ibu pada kegiatan dimaksud yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa 24 Juni 2025

Pukul : 09.00 wita s/d Selesai

Tempat : Ruang Rapat Kantor Bupati Banggai Kepulauan

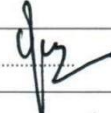
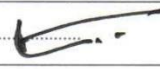
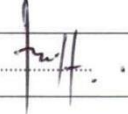
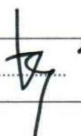
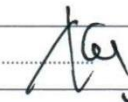
Demikian disampaikan, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


SURIPTO NURDIN, S.Sos
Pemimpin Utama Muda, IV/c
NIP. 19670507 200212 1 005

Tembusan Kepada Yth:
- Bupati Banggai Kepulauan sebagai laporan
- Arsip

**DAFTAR HADIR UNDANGAN
RAPAT KOORDINASI TPAKD PROGRAM KERJA TRIWULAN I TPAKD
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025**

HARI : SELASA
TANGGAL : 24 JUNI 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	RUSLI MOIDADY, ST.,MT.,AIFO	BUPATI BANGGAI KEPULAUAN	1
2	SERFI KAMBEY	WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN	2 
3	SURIPTO NURDIN, S.Sos	Pj. SEKRETARIS DAERAH	3 
4	Sumidi. M.	Kadis Purbica	4 
5	Akbar S.	Ptlu/Korng/Korng	5 
6	Dan Lamsan	Kadis Purbica	6 
7	Korng	Sekretaris Kamis	7 
8	Sipandir P.	BANK SULTEN	8 
9	Lanti	Bank Sulten	9 
10	ABD. AZIS T. LUMBON	SOK BAPENDA	10 
11	Iskandar P.	Inspektur	11 
12	Amir Supriyati	Kasubag	12 
13	Norison S.	Kasubag	13 
14	Desran J. Perlia	Kasubag	14 
15	Helmy Mohamad.	DIRUT BPRS KHA.	15 
16	Rafika Amalia	CS BPRS KHA	16 
17	Arifin OAB	LAB - PAB & CA	17 
18	Hyonant Suko	KASIB DISTUB	18 
19	Ersandy Dasa	KASIB Perikanan	19 
20	Muhammad HSKI	Pmca	20 
21	Ar. Adh. Guraan	Kadis Purbica	21 
22	Argora	SIKAP	22 
23	Akhil P.P	Bab Maclini	23 
24	Adriel M	Kasubag	24 

25	Moh. Khairan	Kabid Perencanaan	25	
26	Hasida Yambere	Pj Kaunit B21 Salakan	26	
27	M. Amin	Kadis Jaziel	27	
28	Jitoran M	Kadis Ketupung	28	
29	RADIA M. BOMERTEN	Sekdis PMD	29	
30	Juliana - S	Staf Distru	30	
31	Adamin T	Staf Distru	31	
32	RONTANTUTY	Staf Distru	32	
33	Harnawati	Dikbud	33	
34	Kanirah	KASUB Kewangan	34	
35	Lis Snganti	Humas Kemnag	35	
36	MUA. RUPANITO	KANWAG	36	
37	Stausi Paul	Kepdik	37	
38	STEVEN M	Ka. BPKAD	38	
39	Dolki. D	Protokol	39	
40	Mabilan	Kabg Prokopim	40	
41	KYATARI	KASUBAG	41	
42	Higrawati Abu	Staf	42	
43	ROSUNDA BUNGALAH	Staf	43	
44	EFENDI. H	ADC Sekda	44	
45	PANSECI	ADC KASUB	45	
46	MUBIUS. B.	DRIVER SEKDA	46	
47	ANDI LAPOLANTI	Staf DOKUM	47	
48	AMRINI	Staf PROKOPIM	48	
49	Saprin Pandipen	KASUBAG	49	
50	YUFRUDA	Staf	50	
51	MERI. SIA	Staf PROKOPIM	51	

52	Karim Potilubang	Penguluh Sosial		52	
53	KARIMAN	KASUBAG Perikanan		53	
54	YULIANA N. BAICHA	STAF		54	
55	SEIMUS RINIAWATI. P. NOON	staf		55	
56	MURYAHY. TALIGIPU	KASUBAG		56	
57	Sunio	Samp. Mangrove		57	
58	TRINOVIA	Staf Perekonomian		58	
59	Yuga	Staf		59	
60	Eky	Staf		60	
61	ESLINA	Staf		61	
62	JAMES Primitan	Lead Perikanan		62	
63				63	
64				64	
65				65	
66				66	
67				67	
68				68	
69				69	
70				70	

Sabang, 24 Juni 2025

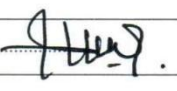
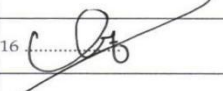
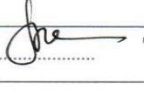
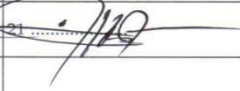
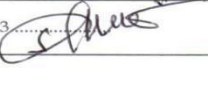
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
SETDA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

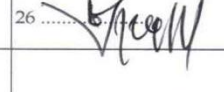
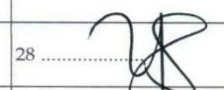
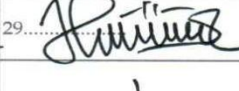
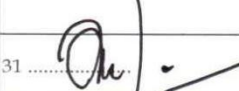
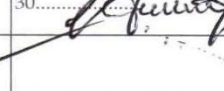
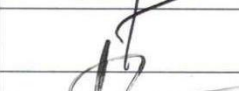
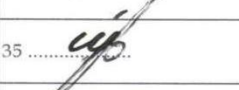
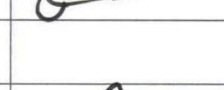
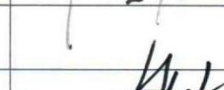
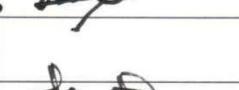
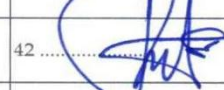
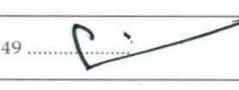
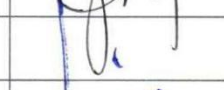
PAISAL

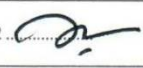
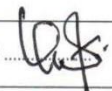
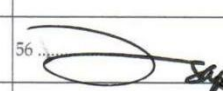
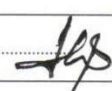
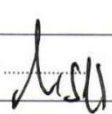
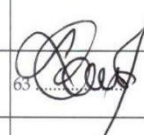
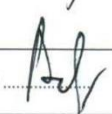
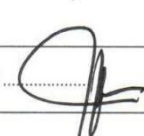
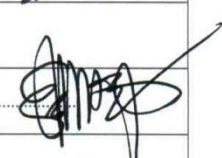
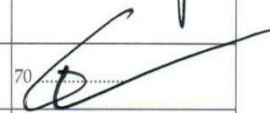
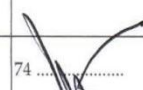
PAISAL FAHIL MUHAMMAD, S.Sos
Pembina Tk. IV/b
NIP. 19750325 200502 1 004

**DAFTAR HADIR UNDANGAN
EDUKASI KEUANGAN KEPADA CAMAT DAN KEPALA DESA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025**

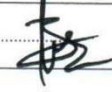
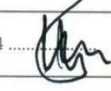
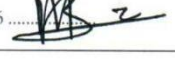
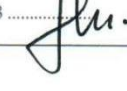
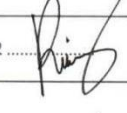
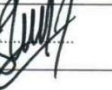
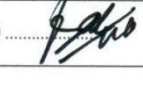
HARI : SELASA
TANGGAL : 24 JUNI 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	RUSLI MOIDADY, ST.,MT.,AIFO	BUPATI BANGGAI KEPULAUAN	1
2	SERFI KAMBEY	WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN	2 ... Hadir
3	SURIPTO NURDIN, S.Sos	Pj. SEKRETARIS DAERAH	3 
4	LENI SAMANA	Pj. Kader Koyobunga	4 
5	Ridwan A. Nulia	Kasabag Keuangan Kcc. Tiungkep	5 
6	AGUSTINA PARTIA	Pj. KADES OLEMO	6 
7	YAKONIAS MALONTA	KADES TOLULOS	7 
8	Rafika Amalia	CJ BPKS KIN	8 
9	Agel. KINUT BATALLO	Pj. KADES LOLANTANG	9 
10	PARDI PAU	Pj. KADES BALALON	10 
11	KRISTINCE BAPITANGGEM	Pj. Kades Aulul	11 
12	SANTOMARIUS . M	Pj. KADES TOLO	12 
13	JANTI HOMI	Pj. Kades Montomisan	13 
14	ROSLINA. S .	Pj. KADES TISOLO	14 
15	ESAU L. MBOLEMO	Pj. KADES ULU	15 
16	HARJUN SF. BONEVO	SEKDES ..	16 
17	Iskandar B. Monggib	Pj Kades Labibi	17 
18	PANI LATIPO	Pj Kades Olemo por.	18 
19	Sarpin . R	Kepala Desa lalaya	19 
20	ASER LOMBAN	Pj. KADES TALAS-TALAS	20 
21	ARTO LARISA	Pj. KADES MALINGGONG	21 
22	ORDIN LALIB	Pj. KADES PAISUBATU	22 
23	SIKRI HAKIMADAS	Pj KADES TONURON	23 
24	HASNI M. KALU	Pj. KADES - ALASARI	24 

25	Ridwan. B	Pj. Kades Mendak	25		
26	ALEXANDRIA BATULU	PH. Sek Des ^{kecamatan} _{Bungin}	26		
27	KORIM FADIMO	Sekdes Mandoh	27		
28	HANISA BINDING	Pj. Kades Peling Sasa	28		
29	ARJONI TUNDEON	Pj. Kades Sabalak	29		
30	Hajar Djiha	KADES PIPILOGOT	30		
31	Siswandi. X	SEKCAM BULSEL	31		
32	TRENGKI SAPAN	N. Kades Sapelay	32		
33	Riki Puse	SEKDES BUKO	33		
34	ALBUN. BALAGAT	KEMR BELUNGAN	34		
35	CHARLES. M	KADES LANDIMAN	35		
36	BASRA. CUA	KADES BULAGI II	36		
37	FANDRI ARI	KADES BULAGI II	37		
38	MERENI MATTANG	KADES BULAGI II	38		
39	UGAAN YADALIA	KADES BULAGI II	39		
40	ALBERTINUS SAGMAN	KADES BULAGI II	40		
41	DAN SAGMAN	KADES BULAGI II	41		
42	REKMAN SIAPATI	KADES BULAGI II	42		
43	HENRIK IREKA	KADES BULAGI II	43		
44	SUTRISNO A. NONSI	KADES BULAGI II	44		
45	NARSYN. BABAM	KADES BULAGI II	45		
46	Pitar Pasinggir	KADES BULAGI II	46		
47	NURKADI POLOMBUA	KADES BULAGI II	47		
48	SUPRATMAN. L	KADES BULAGI II	48		
49	VARMAN J. M	KADES BULAGI II	49		
50	BURHAN S. EDI. S	KADES BULAGI II	50		
51			51		

52	HURDIN	PJ. KADES Ambelung	52	
53	PANASIRUS TIDA	PJ KADES GANSAL	53	
54	MATIK ..	Ke. Kes.	54	
55	BAKRI ASURAT	KAS LOTO	55	
56	SURIADI. AIPA	KDS LUKSAGU	56	
57	ABDULLAH S DAMIR	PJ. Sambut	57	
58	SYUKIYAH SURYAS	PJ kades Apal. Buled.	58	
59	ILUSKAN BANGGIDEK	KADES KOLAK	59	
60	K. DONALD. LODAK	KADES TOME	60	
61	JUMHAR. K	PJ KADES KOMBAT	61	
62	HASSAWAT. M	PLT. LUPALI SALALA	62	
63	KUON K.	PJ. ORAN	63	
64	SUMRA ALISI	PJ. KADES LIATIR	64	
65	LAHALI	CAMAT TASEL	65	
66	IBERAN LP DIANG	PJ KADES. Boyomudo	66	
67	Lisnawati Tibupot	KADES MANULUSAN	67	
68	Mesthin M.	PJ. Kades Plu	68	
69	Inayah, ST	PJ. kades Bolongan	69	
70	RENODRAFA BUNG	SEKDEK LITAK	70	
71	KIZAL	PLH. CAMAT TOTIBUNG	71	
72	PATMON PAKABASI	KADES MANGAIS	72	
73	Haris Olimasari	SEKDES PERIT	73	
74	IRSAH SY. RADENGAS	PJ. KADES LALANDAY	74	
75	HANI OPAB	KAMAT BUTAGI	75	
76	AARDIN. Sanuang	PJ. Kades Tataranabag	76	
77	PAEMAN LAGA	PJ. KADES KATYU	77	
78	Jufri Lonafr	PJ. Kades Bakalan	78	

79	Rumarani H	PLT Camat Boko	79	
80	Schudri Oth An	K. L. B. B. B. B. B.	80	
81	SUABU MALITA	Pj. Dt. B. B. B. B.	81	
82	Hajis Hadji	Pj. Dt. B. B. B. B.	82	
83	EFFENDI Latta	Pj. Dt. L. B. B. B.	83	
84	Jonc. P.	Pj. Dt. B. B. B. B.	84	
85	Ilebal Patas.	Pj. Dt. B. B. B. B.	85	
86	Bursi Uino	Pj. Dt. B. B. B. B.	86	
87	NILAWATI. D. ASLEM	Pj. Dt. B. B. B. B.	87	
88	APD. H. H. H. H. H.	KADES B. B. B. B.	88	
89	SYAMHIEL T	KADES B. B. B. B.	89	
90	SAHARUW. T	SEKRETARIS D. B.	90	
91	HIRMAWAN WAHYU	Pj. Dt. B. B. B. B.	91	
92	AMRAN D. M.	SEKRETARIS B. B. B. B.	92	
93	AMR. G. TANDUNG	KADES B. B. B. B.	93	
94	SERMINAT. A	Pj. Dt. B. B. B. B.	94	
95	ISTONO. YONO	KADES B. B. B. B.	95	
96	GERSON YERONG	Pj. Dt. B. B. B. B.	96	
97	GUNAWAN. GAIK	KADES B. B. B. B.	97	
98	HAERWON.	Pj. Dt. B. B. B. B.	98	
99	BULHARI	KADES B. B. B. B.	99	
100	APRIANTO	Staf Prokopim	100	
101	Eky	Staf Prokopim	101	
102	ADRIAN H. LAMBA	KADES B. B. B. B.	102	
103	ADIW A. TIPANA	Pj. Dt. B. B. B. B.	103	
104	ASUNG POKAT	KADES B. B. B. B.	104	
105	YUPRIDA	Staf	105	

106	ROSLIMDA Bungalah	staf		106	
107	BAROTOMBUS S.	staf	107		
108	APRIZAL	staf		108	
109	MARIA	staf	109		
110	DINDI	staf		110	
111	FIKRI	STAF	111		
112	Hulda	staf		112	
113	Kusur soganu	staf	113		
114	Muhyo fatamun	staf		114	
115	EPENDI. H	ADC	115		
116	MUSIUS. B	DRIVER BERDA		116	
117	Bony masi	kades	117		
118	fatma	staf bg. umum.		118	
119	Mulu	— 11 —	119		
120	Kuli	— 11 —		120	
121	ROSLIN	staf	121		
122	Pirky lyahriz	staf		122	
123	MARLAN	staf	123		
124	KATUN	kawasa		124	
125	JEANER	staf	125		
126	YULIANA N. BAKLA	staf		126	
127	SAPPRAL	staf	127		
128	Sugianto pangli	staf		128	
129	Nipai	staf bg. k	129		
130	FALSAH	staf		130	
131	BARUMATO	staf	131		
132	MIMI SILA	staf perkebunan		132	

133	ESLINA	Staf EKONOMI	133 <i>[Signature]</i>	
134	ERIKSON	STAF		134 <i>[Signature]</i>
135	Saprin Pandipai	Kasubag	135 <i>[Signature]</i>	
136	Purnu	Staf		136 <i>[Signature]</i>
137	Saroni, A	Staf	137 <i>[Signature]</i>	
138	Saldi HARTONO	Staf		138 <i>[Signature]</i>
139	Ronaldo	Staf	139 <i>[Signature]</i>	
140	Ridwan Hani	Staf		140 <i>[Signature]</i>
141	Subai &	Kasubag	141 <i>[Signature]</i>	
142	Rasu	Staf		142 <i>[Signature]</i>
143	Hijrawati	Staf	143 <i>[Signature]</i>	
144	AWAL	Staf		144 <i>[Signature]</i>
145	HERDAN	Staf	145 <i>[Signature]</i>	
146	TRINOVIA	Staf		146 <i>[Signature]</i>
147	ABD-JALL	Pj. Kades	147 <i>[Signature]</i>	
148	Summi O	Staf		148 <i>[Signature]</i>
149	SARINA	Kasubag	149 <i>[Signature]</i>	
150	AMRD	Staf		150 <i>[Signature]</i>
151	Salsa	Staf	151 <i>[Signature]</i>	
152	IUR INTAN	STAF		152 <i>[Signature]</i>
153	Dutrisno	Kasubag Staf	153 <i>[Signature]</i>	
154	Jeri	Staf		154 <i>[Signature]</i>
155	ARJOAI	Staf	155 <i>[Signature]</i>	
156	YEPUNI	Staf		156 <i>[Signature]</i>
157	PAISAL P.M	KABAG EKONOMI	157 <i>[Signature]</i>	
158	SPRANSIARASOETI, P. MOAM	Staf protopian		158 <i>[Signature]</i>
159	BUNHARI	Kasubag	159 <i>[Signature]</i>	

160	Vina	Staf		Cap
161	Cespan J. Rila	Atas	Cap	
162	Adenaw	Staf		Cap
163	ATI	Staf	Cap	
164				
165				
166				
167				
168				
169				
170				
171				
172				
173				
174				
175				
176				
177				
178				
179				
180				


 Kepala Dinas
 Kabupaten Banggai Kepulauan
 Banggai Kepulauan, 15 Mei 2025
 (Stempel Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan)

1.1.2 Menyelenggarakan Pelatihan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil (Dinas Perikanan)

Pemberdayaan nelayan kecil adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian nelayan kecil dalam menjalankan usaha perikanan:

- mendampingi kelompok nelayan melalui pelatihan manajemen kelompok
- memberikan pengetahuan tentang perbaikan mesin
- memberikan pengetahuan tentang teknik penambalan perahu menggunakan resin non-sag epoxy,
- bantuan peralatan utama untuk perawatan dan perbaikan mesin

Dokumentasi Kegiatan



1.1.3 Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan Melakukan Kegiatan Fasilitasi Akses Pemasaran dan Saranan

Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan melaksanakan kegiatan Fasilitasi Akses Pemasaran dan Sarana Pendukung bersama Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai bagian dari program Akses Reforma Agraria Tahun 2025. Kegiatan ini di pusatkan pada balai Desa Okumel, Kecamatan Liang, pelatihan yang di lakukan yaitu pembuatan nugget ikan, yang merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat Desa Okumel, desa yang dikenal dengan potensi Perikanannya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Dito Syaferli selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan, Mohammad Yasir selaku Plt. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan beserta staf, Surianto U. Abbas selaku Kepala Desa Okumel, Edy Nashry Abubakar selaku Koordinator Penyuluh Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan, Nurhidayati H. Lasida selaku Penyuluh Perikanan wilayah kecamatan Liang, dan Field Staff Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan.





1.1 Dinas Pertanian Giat Pertanian Bidang Peternakan (Sosialisasi Pemeliharaan Ternak dan Pelayanan Keswan Kerja Sama dengan KKN UGM)

Dokemntasi Dinas Pertanian Giat Bidang Peternakan, Sosilaisasi Pemeliharaan Ternak dan Pelayanan Keswan Kerja Sama demgam KKN UGM





1.2 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Dalam sambutannya Rusli Moidady menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya dan apresiasi kepada Bank Sulteng dan Bank BPR cabang Salakan, yang telah menunjukkan keberpihakannya kepada para pengusaha kuliner untuk mendapatkan fasilitas gerai.

35 unit gerai tersebut berasal dari Bank Sulteng 20 unit dan 15 unit dari Bank BPR lokadana.

DOKUMENTASI BUPATI BANGGAI KEPULAUAN RESMI MENYERAHKAN 35 GERAI KEPADA PELAKU UMKM DI TAMAN KOTA SALAKAN KERJA SAMA DENGAN BANK SULTENG CABANG SALAKAN DAN BANK BPR CABANG SALAKAN



1.3 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Pemerintahan Daerah menjalin kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam melaunching Program Berkah Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Banggai Kepulauan

Peluncuran program berkah bertempat di Pasar Desa Liang, Kecamatan Liang dan di hadiri Bupati (secara virtual), Pj. Sekda, Asisten dan Staf Ahli Bupati, Ketua TP-PKK, Kepala BPJS Cabang Luwuk, KEMENAG, Wakapolres, Pj. Pabung, Kapolsek dan Danramil Kec. Liang, Perwakilan DPRD, Camat Liang, Kepala Desa Liang, Kepala OPD yang sempat hadir, masyarakat Desa Liang dan Desa Kombutokan Kec. Totikum, Desa Sumondung Kec. Bulagi, Desa Buko Dusun Alani Kec. Buko Selatan (via zoom)

Dokumentasi Kegiatan



1.2 Program Peningkatan Pemanfaatan Produk dan Layanan Industri Keuangan Non-Bank

Program Peningkatan Pemanfaatan Produk dan Layanan Industri Keuangan Non-Bank merupakan Jenis Program Kerja Lainnya untuk Mendorong Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan dengan klasifikasi Optimalisasi Produk dan layanan -asuransi (Asuransi Mikro, Asuransi jiwa, Asuransi umum, AOTP, AUTS/K, Asnel, lainnya)

1.3 Program Mainda Ba Tabung

Salah satu sasaran keuangan inklusif dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yaitu kelompok Pelajar, Mahasiswa dan Pemuda Kelompok pelajar/siswa memiliki potensi yang besar untuk peningkatan inklusi keuangan. Adanya kebutuhan produk keuangan berupa tabungan dengan karakteristik dan fitur yang sesuai dengan kebutuhan kelompok pelajar/siswa.

Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) merupakan salah satu bentuk Aksi Pelajar Indonesia Menabung dalam rangka implementasi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung. Program ini menjadi salah satu media edukasi bagi para pelajar untuk mulai mengenal konsep menabung sejak dini. Melalui program ini, kita berharap nantinya seluruh pelajar telah memiliki rekening tabungan sehingga pada saat mereka dewasa mereka siap untuk menggunakan berbagai produk dan layanan keuangan. Dalam implementasinya, program KEJAR dapat menggunakan berbagai produk tabungan anak yang telah dimiliki oleh perbankan atau dengan menggunakan Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)

Di Kabupaten Banggai Kepulauan mencanangkan Program Mainda Ba Tabung yang merupakan Jenis Program Simpanan Pelajar (SimPel) untuk Mendorong

Budaya Menabung Sejak Dini Dengan Target Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), melalui program mai nda batabung ini diharapkan kepada semua siswa dan orang tua dapat menerima manfaat untuk mengajarkan kebiasaan menabung sejak dini sangat baik diterapkan untuk membentuk karakter seorang anak karena mereka akan belajar mengerti bagaimana menggunakan uang dengan bijak untuk mempersiapkan masa depannya. Dengan mengajarkan anak menabung berarti sebagai orang tua sudah melatih anak sejak dini antara lain

1. Anak jadi lebih menghargai uang
2. Anak dilatih untuk mengelolah keuangan
3. Anak dilatih untuk mandiri dan disiplin
4. Anak dilatih untuk belajar hidup hemat dan sederhana
5. Membentuk anak menjadi pribadi yang sabar
6. Dapat memiliki dana darurat.

Dari Program tersebut Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Bupati Banggai Kepulauan telah mengeluarkan surat Edaran :

1. Surat Edaran Nomor : 900.1.7.3/2.130/Bag.Ekon/IV/2025 tentang Program Satu Pelajar Satu Rekening.
2. Surat Edaran Nomor : 900.1.7.3/2.129/Bag.Ekon/IV/2025 tentang Himbauan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Dengan demikian diharapkan kepada semua ASN dapat mendukung program tersebut. Dan juga dibutuhkan peran aktif pemerintah daerah untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan agar seluruh produk dan layanan lembaga jasa keuangan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Dorongan OJK dalam pelaksanaan program kerja TPAKD di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Surat Edaran Bupati Banggai Kepulauan
No.900.1.7.3/2.130/Bag.ekon/IV/2025



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

Salakan, 10 April 2025

Kepada

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Direktur PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Salakan
4. Kepala Sekolah Se-Kabupaten Banggai Kepulauan

Di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 900.1.7.3/2.130/Bag.Ekon/IV/2025

TENTANG

**PROGRAM SATU PELAJAR SATU REKENING
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58111/D/HK/2009 tentang Program Simpanan Pelajar serta Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 580/585/OJK tentang Program Satu Pelajar Satu Rekening Provinsi Sulawesi Tengah. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan memprioritaskan Gerakan Kabupaten Banggai Kepulauan Menabung dan berkomitmen meningkatkan Inklusi dan Literasi Keuangan serta mendorong budaya menabung peserta didik sejak dini melalui kepemilikan rekening oleh seluruh pelajar (Satu Pelajar Satu Rekening) dengan melaksanakan hal sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar menghimbau seluruh Sekolah di wilayah masing-masing untuk berpartisipasi aktif mewujudkan pembukaan/kepemilikan rekening tabungan oleh peserta didik di seluruh Sekolah/Satuan Pendidikan dan berpartisipasi mengkampanyekan Hari Indonesia Menabung dengan mengoptimalkan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan untuk berpartisipasi aktif mewujudkan pembukaan/kepemilikan rekening tabungan bagi seluruh peserta didik di MI, MTs, MA serta Santri di Pondok Pesantren;
3. Direksi, Pimpinan Cabag PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Salakan agar mensosialisasikan budaya menabung serta produk tabungan yang dimiliki kepada pelajar khususnya produk Simple/Simpel IB baik secara Virtual atau Pertemuan Langsung;
4. Kepala Sekolah Se-Kabupaten Banggai Kepulauan agar menghimbau seluruh Peserta didik di wilayah masing-masing agar mewujudkan Pembukaan / Kepemilikan Rekening dan berpartisipasi mengkampanyekan Hari Indonesia Menabung dengan mengoptimalkan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
5. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk penyempurnaan pelaksanaan Program Gerakan Banggai Kepulauan Menabung dan melaporkannya secara berkala kepada Bupati dengan ditembuskan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI NOIDADY, ST., MT

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
3. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan

Surat Edaran Bupati Banggai Kepulauan No.900.1.7.3/2.129/Bag.ekon/IV/2025



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

Salakan, 10 April 2025

Kepada

- Yth. 1. Inspektur Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Para Kepala Dinas/Badan di Lingkungan Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Kabupaten Banggai Kepulauan
7. Para Lurah di Lingkungan Kabupaten Banggai Kepulauan
8. Para Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan
9. Para Kepala UPTD di Lingkungan Kabupaten Banggai Kepulauan
10. Direktur PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Salakan

Di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 900.1.7.3/2.129/Bag.Ekon/IV/2025

TENTANG

HIMBAUAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DIWILAYAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58111/D/HK/2009 tentang Program Simpanan Pelajar serta Surat Edaran

Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 580/585/OJK tentang Program Satu Pelajar Satu Rekening Provinsi Sulawesi Tengah. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan memprioritaskan Gerakan Kabupaten Banggai Kepulauan Menabung dan berkomitmen meningkatkan Inklusi dan Literasi Keuangan serta mendorong budaya menabung peserta didik sejak dini melalui kepemilikan rekening oleh seluruh pelajar (Satu Pelajar Satu Rekening) dengan melaksanakan hal sebagai berikut :

- Inspektur Daerah / Sekretaris DPRD / Kepala Dinas / Badan / Kepala Bagian/Camat/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah/Lurah/Kepala Puskesmas/Kepala UPTD agar menghimbau kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) diwilayah kerja masing-masing untuk berpartisipasi aktif mewujudkan pembukaan/kepemilikan rekening tabungan oleh masing-masing anak melalui simpanan Pelajar atau tabungan anak lainnya;
- Kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar berpartisipasi mengkampanyekan Hari Indonesia Menabung dengan mengoptimalkan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
- Kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar mengajarkan kepada masing-masing anak untuk menabung sejak dini dan menjadi kebiasaan yang baik untuk masa depannya;
- Direksi, Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Salakan agar mensosialisasikan budaya menabung serta produk tabungan yang dimiliki kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelajar khususnya produk Simple/Simpel IB baik secara Virtual atau Pertemuan Langsung;
- Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk penyempurnaan pelaksanaan Program Gerakan Banggai Kepulauan Menabung dan melaporkannya secara berkala kepada Bupati dengan ditembuskan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOLEADY, ST., MT

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
- Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah di Jakarta
- Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
- Gubernur Sulawesi Tengah di Palu
- Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan

JUMAH REALISASI SIMPEL DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

No	Kabupaten/Kota	Mar-25				Mei-25				Kenaikan Jumlah Rekening Reguler	Kenaikan Jumlah Rekening Dormant
		Jumlah Sekolah	Jumlah Rekening	Rekening Dormant	Jumlah Nominal	Jumlah Sekolah	Jumlah Rekening	Rekening Dormant	Jumlah Nominal		
1	Kab. Banggai Kepulauan	140	21,287	6,228	4,271,824,040	142	21,140	6,333	4,292,328,106	(147)	105
	Provinsi Sulawesi Tengah	8,329	694,895	255,150	128,344,995,975	8,589	685,230	265,828	126,727,078,979	(9,665)	10,678

1,013

No	Kabupaten/Kota	TW I	TW II
1	Kab. Banggai Kepulauan	- 114	- 42
	Provinsi Sulawesi Tengah	- 152	1,013

JUMAH DATA QRIS PROVINSI SULAWESI TENGAH TA. 2025

TANGGAL	20250131	20250228	20250328	20250430	20250530
KPwBI Provinsi Sulawesi Tengah	223799	229515	235948	248090	248942
SULAWESI TENGAH	223799	229515	235948	248090	248942
Kab. Banggai	29217	29730	30356	30844	31101
Kab. Banggai Kepulauan	4935	5194	5595	7554	7643
Kab. Buol	6944	7096	7244	7350	7509
Kab. Donggala	9289	9499	9732	9917	10502
Kab. Morowali	23126	24049	24999	27168	27950
Kab. Parigi Moutong	28407	28817	29399	30670	31045
Kab. Poso	14565	14788	15051	15275	15506
Kab. Sigi	10079	10456	10917	12348	11209
Kab. Tojo Una Una	6397	6542	6730	6818	6970
Kab. Toli Toli	14777	15046	15410	16383	16726
Kota Palu	76063	78298	80515	83763	82781

TANGGAL	20250328	20250430	20250530	TW II
KPwBI Provinsi Sulawesi Ter	235948	248090	248942	
SULAWESI TENGAH	235948	248090	248942	12994
Kab. Banggai	30.356	30.844	31.101	745
Kab. Banggai Kepulauan	5.595	7.554	7.643	2048
Kab. Buol	7.244	7.350	7.509	265
Kab. Donggala	9.732	9.917	10.502	770
Kab. Morowali	24.999	27.168	27.950	2951
Kab. Parigi Moutong	29.399	30.670	31.045	1646
Kab. Poso	15.051	15.275	15.506	455
Kab. Sigi	10.917	12.348	11.209	292
Kab. Tojo Una Una	6.730	6.818	6.970	240
Kab. Toli Toli	15.410	16.383	16.726	1316
Kota Palu	80.515	83.763	82.781	2266

JUMAH GEMAR INVESTASI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TA. 2025

TPAKD	TW I 2025 (FEB)				DELTA TW I	TW II			DELTA TW II
	SAHAM	RD	SBN	TOTAL	SID	SID Saham Bulanan	SID Pasar Modal Bulanan	Total	SID
Kab. Banggai Kepulauan	888	3,773	87	4,748	154	951	4,013	4,964	216

PEMBUKAAN REKENING SIMPEL CAB SALAKAN TAHUN 2025

NO	NAMA PEMILIK REKENING	ALAMAT	NO. REKENING
1	NUR ALIFA KASIM	TATABA	0060210012273
2	GRESI	TOOLON	0060210012380
3	HARDIN	LABOTAKANDI	0060210012192
4	ONAL DAMUTAN	LABOTAKANDI	0060210012376
5	FELI SOKUMBA	BAKALINGA	0060210012505
6	ABD.GIFARI	LABIBI	0060210012354
7	NUR HALIMA	LABIBI	0060210012203
8	FANDI	SALAKAN	0060210012424
9	MOH. RAMZI	BAKA	0060210012214
10	ZIADATUL KHAIR ABD.HAFID	BAKA	0060210012133
11	MOHAMMAD NOFRI	BAKA	0060210012170
12	FIRZAM HAQ	BAKA	0060210012321
13	FAZRUL S. KAMAGI	KEL.SALAKAN	0060210012295
14	SALSABILA MAHARANI ABD FATTAH	ABASON	0060210012645
15	GIVELSA JUANITA MAWOTO	TOMPUDAU	0060210012144
16	AGRIVA BAYUL	TOMPUDAU	0060210012096
17	GABRIEL JUNIARKA MADALO	TOMPUDAU	0060210012155
18	MORGAN YONATHAN DAYAM	TOMPUDAU	0060210012181
19	GRIZELLA KANZA LAEMPAH	BONGGANAN	0060210011820
20	STIVEN MANGADANG	BONGGANAN	0060210012004
21	MOH. ADJI SAKHA	BONGGANAN	0060210012166
22	RIVALDI LAITI	BONGGANAN	0060210012446
23	RYUKA AIZAWA	TOBING	0060210012251
24	ASTIDININGSIH KASENG	TOBING	0060210012284
25	SELTJA BALA	GANSAL	0060210012306
26	ALFRIANSYAH M MAPPA	TINANGKUNG	0060210012660
27	MAIKAEL TALANGANI	BATANG BABASAL	0060210012030
28	FRILAN MADAE	BATANG BABASAL	0060210012483
29	GRATHIA THRULY HESSED PANTOUW	BATANG BABASAL	0060210012236
30	AL-FIZARAMADANI H. LAPADJI	KOMBUTOKAN	0060210012461

1.5 Kegiatan Edukasi Keuangan

Kegiatan edukasi keuangan adalah strategi kebijakan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku dalam mengelola keuangan.

Materi edukasi keuangan yang dapat diberikan kepada masyarakat mencakup:

- Karakteristik sektor jasa keuangan
- Karakteristik produk dan/atau layanan, seperti deskripsi, manfaat, risiko, biaya, hak dan kewajiban, cara mengakses, dan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa

1.6 Fasilitas KUR

KUR adalah Kredit Usaha Rakyat, yaitu program pemerintah untuk memberikan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). KUR disalurkan melalui lembaga keuangan dengan bunga rendah dan tanpa agunan tambahan atau agunan yang belum cukup.

Manfaat KUR bagi pelaku UMKM, antara lain: Membantu menambah modal usaha, Memudahkan manajemen keuangan, Meringankan beban usaha, Mendorong perkembangan usaha.

Syarat-syarat untuk mendapatkan KUR, antara lain:

- Warga Negara Indonesia
- Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah
- Memiliki usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimal 6 bulan
- Memiliki rekening tabungan atau giro di lembaga keuangan penyalur KUR

Untuk mengajukan KUR, calon debitur dapat:

1. Mempelajari syarat dan ketentuan di lembaga keuangan penyalur KUR
2. Membawa berkas persyaratan ke lembaga keuangan penyalur KUR
3. Menunggu penilaian kelayakan kredit dari lembaga penyalur KUR

Pada Tahun 2024 ini Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan Sosialisasi KUR kepada Pelaku Usaha Pemula dengan menghadirkan Narasumber dari Kantor Perbendaharaan Negara Luwuk, dari Pihak Perbankan dan Industri Jasa Keuangan Non Bank yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan.

1.6.2 Realisasi KUR di Kabupaten Banggai Kepulauan

DATA PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT MENURUT SEKTOR WILAYAH KABUPATEN/KOTA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN BULAN JANUARI TA. 202

NO	WILAYAH	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL
1	KAB. BANGGAI KEPULAUAN (7207)													
	DEBITUR	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440
	NILAI AKAD	16,903,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,903,500,000
	OUTSTANDING	15,947,962,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,947,962,867
	TOTAL DEBITUR	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440
	TOTAL NILAI AKAD	16,903,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,903,500,000
	TOTAL OUTSTANDING	15,947,962,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,947,962,867

**DATA PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT MENURUT SEKTOR WILAYAH KABUPATEN/KOTA DI KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN BULAN FEBRUARI TA. 2025**

NO	WILAYAH	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL
1	KAB. BANGGAI KEPULAUAN (7207)													
	DEBITUR	440	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,133
	NILAI AKAD	16,903,500,000	20,797,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,701,400,000
	OUTSTANDING	15,947,962,867	19,895,053,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,843,016,214
	TOTAL DEBITUR	440	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,133
	TOTAL NILAI AKAD	16,903,500,000	20,797,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,701,400,000
	TOTAL OUTSTANDING	15,947,962,867	19,895,053,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,843,016,214

DATA PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT MENURUT SEKTOR WILAYAH KABUPATEN/KOTA DI KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN BULAN MARET TA. 2025

NO	WILAYAH	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL
1	KAB. BANGGAI KEPULAUAN (7207)													
	DEBITUR	440	693	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,547
	NILAI AKAD	16,903,500,000	20,797,900,000	20,054,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,755,500,000
	OUTSTANDING	15,947,962,867	19,895,053,347	19,672,755,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,515,771,525
	TOTAL DEBITUR	440	693	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,547
	TOTAL NILAI AKAD	16,903,500,000	20,797,900,000	20,054,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,755,500,000
	TOTAL OUTSTANDING	15,947,962,867	19,895,053,347	19,672,755,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,515,771,525

DATA PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT MENURUT SEKTOR WILAYAH KABUPATEN/KOTA DI KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN BULAN APRIL TA. 2025

NO	WILAYAH	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL
1	KAB. BANGGAI KEPULAUAN (7207)													
	DEBITUR	440	693	414	322	0	0	0	0	0	0	0	0	1,869
	NILAI AKAD	16,903,500,000	20,797,900,000	20,054,100,000	15,237,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	72,993,100,000
	OUTSTANDING	15,947,962,867	19,895,053,347	19,672,755,311	14,743,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,259,371,525
	TOTAL DEBITUR	440	693	414	322	0	0	0	0	0	0	0	0	1,869
	TOTAL NILAI AKAD	16,903,500,000	20,797,900,000	20,054,100,000	15,237,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	72,993,100,000
	TOTAL OUTSTANDING	15,947,962,867	19,895,053,347	19,672,755,311	14,743,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,259,371,525

**DATA PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT MENURUT SEKTOR WILAYAH KABUPATEN/KOTA DI KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN BULAN MEI TA. 2025**

NO	WILAYAH	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL
1.	KAB. BANGGAI KEPULAUAN (7207)													
	DEBITUR	440	693	414	509	795	0	0	0	0	0	0	0	2,851
	NILAI AKAD	16,903,500,000	20,797,900,000	20,054,100,000	17,740,100,000	20,909,900,000	0	0	0	0	0	0	0	96,405,500,000
	OUTSTANDING	15,218,669,603	18,863,816,978	18,653,502,488	17,105,934,107	20,486,831,152	0	0	0	0	0	0	0	90,328,754,328
	TOTAL DEBITUR	440	693	414	509	795	0	0	0	0	0	0	0	2,851
	TOTAL NILAI AKAD	16,903,500,000	20,797,900,000	20,054,100,000	17,740,100,000	20,909,900,000	0	0	0	0	0	0	0	96,405,500,000
	TOTAL OUTSTANDING	15,218,669,603	18,863,816,978	18,653,502,488	17,105,934,107	20,486,831,152	0	0	0	0	0	0	0	90,328,754,328

**DATA PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT MENURUT SEKTOR WILAYAH KABUPATEN/KOTA DI KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN BULAN JUNI TA. 2025**

NO	WILAYAH	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL
1.	KAB. BANGGAI KEPULAUAN (7207)													
	DEBITUR	440	693	414	509	795	659	0	0	0	0	0	0	3,510
	NILAI AKAD	16,903,500,000	20,797,900,000	20,054,100,000	17,740,100,000	20,909,900,000	22,028,000,000	0	0	0	0	0	0	118,433,500,000
	OUTSTANDING	15,218,669,603	18,863,816,978	18,653,502,488	17,105,934,107	20,486,831,152	21,956,271,281	0	0	0	0	0	0	112,285,025,609
	TOTAL DEBITUR	440	693	414	509	795	659	0	0	0	0	0	0	3,510
	TOTAL NILAI AKAD	16,903,500,000	20,797,900,000	20,054,100,000	17,740,100,000	20,909,900,000	22,028,000,000	0	0	0	0	0	0	118,433,500,000
	TOTAL OUTSTANDING	15,218,669,603	18,863,816,978	18,653,502,488	17,105,934,107	20,486,831,152	21,956,271,281	0	0	0	0	0	0	112,285,025,609

**DATA PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT MENURUT SEKTOR WILAYAH KABUPATEN/KOTA DI KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN BULAN JULI TA. 2025**

NO	WILAYAH	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL
1.	KAB. BANGGAI KEPULAUAN (7207)													
	DEBITUR	440	693	414	509	795	659	129	0	0	0	0	0	3,639
	NILAI AKAD	16,903,500,000	20,797,900,000	20,054,100,000	17,740,100,000	20,909,900,000	22,028,000,000	6,046,600,000	0	0	0	0	0	124,480,100,000
	OUTSTANDING	15,218,669,603	18,863,816,978	18,653,502,488	17,105,934,107	20,486,831,152	21,956,271,281	4,397,000,000	0	0	0	0	0	116,682,025,609
	TOTAL DEBITUR	440	693	414	509	795	659	129	0	0	0	0	0	3,639
	TOTAL NILAI AKAD	16,903,500,000	20,797,900,000	20,054,100,000	17,740,100,000	20,909,900,000	22,028,000,000	6,046,600,000	0	0	0	0	0	124,480,100,000
	TOTAL OUTSTANDING	15,218,669,603	18,863,816,978	18,653,502,488	17,105,934,107	20,486,831,152	21,956,271,281	4,397,000,000	0	0	0	0	0	116,682,025,609

1.7 Fasilitasi Ekosistem Keuangan Inklusif Wilayah Perdesaan

Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) adalah program dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan inklusi keuangan di wilayah perdesaan. Program ini bertujuan untuk menghubungkan lembaga keuangan dengan pelaku ekonomi desa, sehingga mereka dapat mengakses berbagai layanan keuangan dan sumber daya yang dibutuhkan.

Berikut beberapa manfaat dari program EKI:

- Memfasilitasi penciptaan dan pengembangan ide-ide baru yang dapat memperkaya pasar lokal
- Membangun infrastruktur ekonomi yang lebih solid di desa, seperti sistem keuangan, jaringan pemasaran, dan platform pelatihan
- Meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, sehingga dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program EKI, antara lain:

- Pembukaan rekening tabungan
- Penyaluran kredit atau pembiayaan
- Penambahan titik akses keuangan melalui agen Laku Pandai
- Fasilitasi sistem pembayaran QRIS
- Edukasi keuangan dan pendampingan kepada masyarakat desa
- Penyaluran KUR
- Subsidi produk asuransi kecelakaan diri bagi petani dan peternak
- Insentif iuran BPJS bagi perangkat lembaga desa

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di wilayah pedesaan, salah satunya dengan program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Dalam rangka mendorong tingkat literasi dan inklusi keuangan terutama di wilayah pedesaan, OJK Sulteng bersinergi dengan pemerintah daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD),” kata Kepala OJK Sulteng hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan yang dilaksanakan OJK pada 2022, menunjukkan tingkat literasi keuangan sebesar 49,68 persen dan tingkat inklusi keuangan sebesar 85,10 persen.

Di wilayah perkotaan tingkat literasi keuangan adalah sebesar 50,52 persen dan tingkat inklusi keuangan adalah sebesar 86,73 persen, sementara untuk wilayah pedesaan tingkat literasi keuangan masih 48,43 persen dan tingkat inklusi keuangan adalah sebesar 82,69 persen.

Oleh karena itu, program EKI dilaksanakan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, tepatnya di Desa Wisata Luk Panenteng untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di wilayah pedesaan. edukasi keuangan kepada badan usaha milik desa (BUMDes) dan masyarakat Desa Luk Panenteng. Lebih lanjut, melakukan perluasan akses keuangan dengan dilakukannya pembukaan agen laku pandai dan pembukaan rekening simpanan bagi masyarakat umum yang belum memiliki akses.

Selain itu, pengembangan infrastruktur wisata yang menjadi ikon Desa Luk Panenteng dengan memfasilitasi sertifikasi pemandu selam, dan publikasi wisata dengan memanfaatkan sarana publikasi dari pelaku usaha jasa keuangan di Sulawesi Tengah.

Program EKI ini juga menjadi wadah sinergi antarpemangku kepentingan baik dari pemerintah atau regulator, komunitas, akademisi, lembaga jasa keuangan, dan juga media,” kata dia.

Tidak hanya program EKI, kata dia, menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Banggai Kepulauan tentang Program Satu Pelajar Satu Rekening, pihaknya bersama dengan Pemkab Banggai Kepulauan dan bank daerah melaksanakan puncak kegiatan Hari Indonesia Menabung tahun 2023 di SD dan SMP Satu Atap Desa Luk Panenteng. Selain bertujuan mengakselerasi kepemilikan rekening tabungan, khususnya dari segmen pelajar, juga sebagai bentuk komitmen, kerja sama, dan sinergi antara OJK Sulteng dengan pemda.

1.7.1 Kegiatan Pelatihan Pengelola Desa Wisata Tahun 2025

1.8 Program Percepatan dan perluasan akses keuangan masyarakat melalui Agen Laku Pandai.

Laku Pandai disingkat dari Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif, yaitu Program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi .

Agen Laku Pandai adalah pihak yang bekerja sama dengan bank untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat. Program ini merupakan bagian dari Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Laku Pandai) yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Syarat untuk menjadi agen Laku Pandai di setiap bank berbeda-beda, namun secara umum persyaratannya hampir sama. Berikut beberapa persyaratan umum yang ditetapkan oleh OJK:

- Menjadi penduduk setempat yang dikenal baik masyarakat
- Menjadi nasabah bank yang bersangkutan dan dipercaya bank
- Memiliki usaha utama yang telah berjalan minimal 1 tahun
- Memiliki kemampuan, kredibilitas, reputasi, dan integritas yang baik
- Memiliki syarat umum administratif seperti KTP, Kartu Keluarga, dan NPWP

Kenapa Laku Pandai diperlukan?

- Masih banyak anggota masyarakat yang belum mengenal, menggunakan atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya. Antara lain, karena bertempat tinggal di lokasi yang jauh dari kantor bank atau adanya biaya atau persyaratan yang memberatkan.
- OJK, industri perbankan, dan industri jasa keuangan lainnya berkomitmen mendukung terwujudnya keuangan inklusif.
- Pemerintah Indonesia mencanangkan program Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada Juni 2012, satu program di antaranya adalah *branchless banking*.

- *Branchless banking* yang ada sekarang perlu dikembangkan agar memungkinkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya menjangkau segenap lapisan masyarakat di seluruh Indonesia.

Program ini bertujuan menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dapat menjangkau layanan keuangan. Selain itu, juga melancarkan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antarwilayah di Indonesia, terutama antara desa dan kota.

Pertumbuhan Agen Laku Pandai di Kabupaten Banggai Kepulauan

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA TPAKD

2.1. Rekomendasi Kebijakan atas Pelaksanaan Program Kerja TPAKD

Pertumbuhan di sejumlah sektor ekonomi produktif di Provinsi Sulawesi Tengah melalui peningkatan perluasan akses keuangan daerah diperkirakan akan masih berlanjut dan memiliki peluang yang terbuka lebar. Namun demikian, diperlukan sejumlah upaya nyata dan kebijakan tegas dan berkelanjutan untuk optimalisasi sejumlah sektor ekonomi yang menjadi prioritas pembangunan dan unggulan daerah.

Pemerintah Daerah menjadi *stakeholder* yang memegang peranan utama dalam upaya pertumbuhan ekonomi dari sisi perluasan akses keuangan dimaksud. Beberapa langkah dan rekomendasi yang diusulkan untuk dapat direalisasikan oleh Pemerintah Daerah antara lain:

- a. Peningkatan *database* potensi ekonomi dari beragam sektor yang menjadi prioritas dan unggulan;
- b. Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi KPMR;
- c. Menganggarkan dalam APBD untuk pelaksanaan program kerja terkait peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang tidak terbatas pada pelaksanaan rapat, namun juga untuk pendampingan/pembinaan kepada masyarakat umum dan khusus kepada pelaku usaha produktif, maupun untuk pembuatan kajian pembangunan berkelanjutan dengan beragam parktisi/ahli.
- d. Mengalokasikan dana desa untuk hal yang bersifat produktif yang tetap berlandaskan kearifan lokal, seperti mewujudkan pusat-pusat ekonomi baru berbasis agrobisnis dalam mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan;
- e. Penguatan kompetensi SDM di jajaran perangkat daerah yang membidangi sektor-sektor ekonomi produktif terkait pemuktahiran peningkatan produksi dan program inklusi keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sektor-sektor ekonomi produkfit dimaksud;

- f. Harmonisasi kebijakan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di dalamnya.

Peranan yang tidak kalah pentingnya yakni dari OJK selaku regulator sektor jasa keuangan yang diberikan wewenang untuk membuat sejumlah kebijakan dan sinergi dengan banyak beragam pemangku kepentingan, dalam upaya mendorong perluasan akses keuangan di daerah. Beberapa langkah dan rekomendasi yang diusulkan untuk dapat direalisasikan oleh OJK khususnya oleh Kantor Pusat OJK antara lain:

- a. Bersinergi dengan beragam Kementerian maupun Lembaga terkait yang memiliki irisan kepentingan maupun kewenangan yang dapat mendukung upaya perluasan akses keuangan daerah;
- b. Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan komunikasi dengan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang memiliki *power* untuk menggerakkan peran Pemerintah Daerah dalam berpartisipasi lebih aktif dalam upaya perluasan akses keuangan di daerah;
- c. Mengeluarkan kebijakan program perluasan akses keuangan daerah beserta *roadmap* yang jelas, yang turut dibarengi dengan peningkatan kompetensi SDM yang diperlukan untuk menyukseskan program dimaksud;
- d. Memberikan arah, kebijakan dan apresiasi maupun penegasan kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk turut mensukseskan program perluasan akses keuangan di daerah;
- e. Merangkul sejumlah praktisi/ahli yang telah berpengalaman dan terbukti keilmuannya, dalam pembuatan kajian maupun penyusunan kebijakan perluasan akses keuangan daerah;
- f. Melaksanakan rapat koordinasi berskala nasional dalam rangka pemantauan perkembangan perluasan akses keuangan daerah secara rutin dan terjadwal;
- g. Meningkatkan kuantitas dan kualitas program kerja peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

LAMPIRAN FORMULIR EKSEKUTIF KINERJA

Formulir Ringkasan Eksekutif Kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah

TPAKD KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

1. Kegiatan Edukasi Keuangan

No	Nama Kegiatan	Sasaran Peserta	Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Peserta Kegiatan	Materi Kegiatan	Jenis Kegiatan	Metode Pelaksanaan Kegiatan	Periode Triwulan
1.	Kegiatan Pleno Semester 1 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Se-Selawesi Tengah Tahun 2025	Pj. Sekretaris Daerah, Kepala OPD Terkait Dan OJK	Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 25 Maret 2025	20 peserta	Dalam rangka evaluasi program kerja tahun 2024 dan penyusunan rencana prpgram kerja tahun 2025 Tim percepatan daerah Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Rapat Koordinasi	Virtual Meeting Melalui Zoom	Triwulan I
2.	Rapat koordinasi TPAKD Program Kerja Triwulan I dan Rapat Edukasi Kepada Camat Se-kabupaten, Lurah Se Kabupaten dan kepala Desa Se-Kabupaten	Wakil Bupati Banggai Kepulauan, Kepala OPD terkait, OJK dan Bagian Perekonomian, Camat, Lurah dan Kepala Desa	Kabupaten Banggai Kepulauan Tanggal 24 Juni 2025	220 Peserta		Rapat Koordinasi	Offline	Triwulan I dan II

3.	Bupati Banggai Kepulauan Resmi Menyerahkan 35 Gerai Kepada Pelaku UMKM di Taman Kota Salakan Kerja Sama Dengan Bank Sulteng Cabang Salakan dan Bank BPR Cabang Salakan	Pelaku UMKM di Taman Kota Salakan	Banggai Kepulauan Tanggal 21 Juli 2025	35 Gerai	Fasilitasi Kemudahan Usaha Mikro UMKM	Bantuan UMKM	Offline	TW III
4.	Data Qris Kabupaten Banggai Kepulauan	Jumlah Data Qris 2048	30 Mei 2025		Jumlah 7.643			TW II
5.	Gemar Investasi Kabupaten Banggai Kepulauan	Jumlah Saham 888			Jumlah 154			TW I
6.	Gemar Investasi Kabupaten Banggai Kepulauan	Jumlah Saham 888			Jumlah 216			TW II
7.	Statistik Rekening Pelajar Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan	Jumlah Sekolah 140	Jumlah Rekening 21.287 25 Maret 2025	Jumlah Rekening Dormat 6.228	Jumlah Nominal 4.271.824.040			TW I
8.	Statistik Rekening Pelajar Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Banggai	Jumlah Sekolah 142	Jumlah Rekening 21.140 25 Mei 2025	Jumlah Rekening Dormat 6.333	Jumlah Nominal 4.292.328.106			TW II

	Kepulauan							
--	-----------	--	--	--	--	--	--	--

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan Laporan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah disusun, serta melihat fakta yang ada di lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan Sesuai dengan data – data yang di berikan dan di terima dari dinas terkait.

Saran

Dengan adanya laporan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan namun pada kenyataannya masih banyak sekali kekurangan-kekurangan Persoalan ini dikarenakan masih sangat sedikitnya data yang di terima dari dinas – dinas terkait